

## **Analisis Profil Pengangguran di Provinsi Maluku** *Unemployment Profile Analysis in Maluku Province*

Fahrudin Ramly<sup>1\*</sup>, Amin Ramly<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pattimura

<sup>\*</sup>) Corresponding email: [fahrudinramly@yahoo.com](mailto:fahrudinramly@yahoo.com)

Diterima: 13 Maret 2022 | Direvisi: 5 Mei 2022 | Disetujui: 12 Mei 2022 | Publikasi online: 12 Mei 2022

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to identify the unemployment profile in Maluku Province. A qualitative descriptive research method is utilized to characterize the unemployment profile in the form tables and figures in order to attain this purposive. The data was then analyzed economically in light of the study's objectives. The findings revealed that young peoples men of a certain sex and those with a high school/vocational degree or higher were the most unemployed in Maluku Province. The Largest regency/city is Ambon City, while the smallest is the South Buru Regency.*

**Keywords:** *Covid-19, business field, unemployment*

### **ABSTRAK**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil pengangguran di Provinsi Maluku. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan profil pengangguran dalam bentuk tabel dan gambar. Kemudian diinterpretasikan secara ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan jumlah pengangguran di Provinsi Maluku didominasi oleh penduduk usia muda, jenis kelamin laki-laki serta berpendidikan SMA/SMK ke atas. Berdasarkan kabupaten/kota, maka Kota Ambon terbanyak dan terkecil Kabupaten Buru Selatan.

**Kata kunci:** *Covid-19, lapangan kerja, pengangguran*



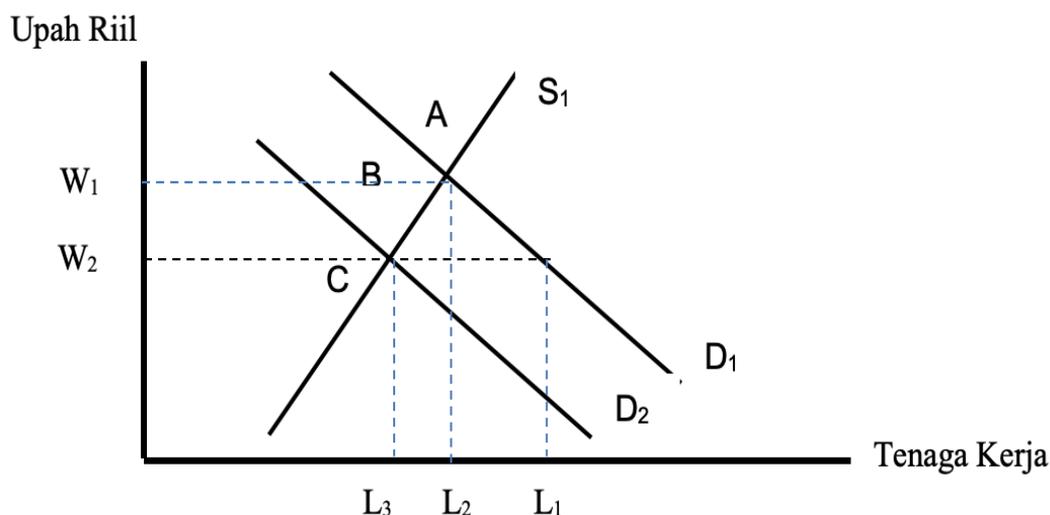


## PENDAHULUAN

Pengertian yang sering digunakan, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Sugianto dan Permadhy, 2020). Pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya (Sukirno, 2001) yaitu: pengangguran konjungtur, pengangguran structural dan pengangguran normal atau friksional sedangkan berdasarkan cirinya terdiri dari: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman dan setengah menganggur.

Pengangguran dapat terjadi karena adanya ketidak seimbangan yang terjadi di pasar tenaga kerja, yang menunjukkan kelebihan tenaga kerja yang ditawarkan dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat (Sukirno, 2001) yaitu: Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan dan pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Teori pengangguran dapat didekati dari 3 (tiga) perspektif teori yaitu teori mekanisme pasar permintaan dan penawaran tenaga kerja, Hukum Okun dan Kurve Phillips. Pada teori permintaan dan penawaran tenaga kerja biasanya dikaitkan dengan waktu, yaitu waktu yang digunakan untuk istirahat/senggang (leisure) dan waktu untuk bekerja yang akan menghasilkan upah. Preferensi individu terhadap pilihan antara leisure dan bekerja ditunjukkan secara grafik oleh kurve indifferen yang menggambarkan gabungan antara waktu senggang dengan pendapatan yang memberikan tingkat kepuasan tertentu. Dari sini diturunkan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kaufman and Hotchkiss (1999); Mankiw (2013), menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah upah yang tidak fleksibel di pasar tenaga kerja. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1.** Kurve Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja

**Sumber data:** Kaufman and Hotchkiss, 1999

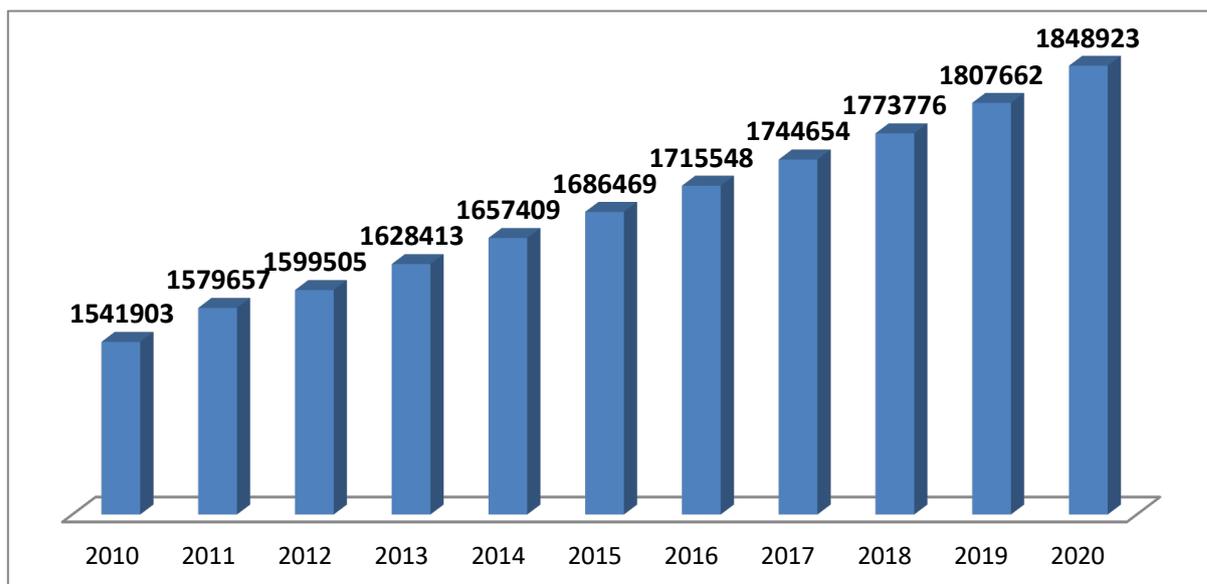
Gambar tersebut menjelaskan bahwa keseimbangan di pasar tenaga kerja terjadi pada titik A dengan tingkat upah  $W_1$  dan jumlah tenaga kerja  $L_2$ . Kondisi ini terjadi kesamaan antara jumlah tenaga kerja yang diminta dan di tawarkan. Jika terjadi kelesuan dalam perekonomian yang mengakibatkan penurunan produksi, maka permintaan tenaga kerja bergeser ke kurve  $D_1$  ke  $D_2$ . Pada pasar persaingan sempurna hal ini menurunkan tingkat upah riil dari  $W_1$  ke  $W_2$ . Keadaan ini akan menurunkan permintaan tenaga kerja menjadi  $L_3$ , sehingga keseimbangan baru terjadi pada titik C. Jika upah riil tidak fleksibel atau kaku, artinya tidak bisa turun menjadi  $W_2$ , maka pengangguran akan terjadi pada

tingkat upah riil  $W_1$  sebesar  $L_3 - L_1$ . Karena jumlah penawaran tenaga kerja sebanyak  $L_1$  sedangkan jumlah permintaan tenaga kerja sebanyak  $L_3$ . Ini berarti bahwa dalam teori kekakuan upah kontraksi dalam perekonomian akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Teori lainnya dikenal Okun's Law yang menyatakan bahwa peningkatan dalam GDP riil akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah pengangguran. Mankiw (2013) menyatakan bahwa hubungan antara GDP dengan pengangguran bersifat negatif yang berarti jika terjadi kenaikan dalam GDP sebesar 2% akan menurunkan pengangguran sebesar 1%. Artinya untuk menjaga tingkat pengangguran pada tingkat alamiah, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan stabil. Sedangkan kurve Phillips dinyatakan sebagai suatu keadaan trade-off antara inflasi dengan pengangguran walaupun hanya terjadi dalam jangka pendek dan dapat dipengaruhi oleh permintaan aggregate. Intinya adalah jika terjadi peningkatan aggregate, maka permintaan tenaga kerja akan bertambah yang berdampak pada penurunan pengangguran, sementara disisi yang lain akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang berdampak kepada kenaikan harga-harga atau inflasi (Blanchard and Johnson, 2013).

Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan kesempatan kerja atau dengan kata lain mengurangi pengangguran. Disadari bahwa pengangguran adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh setiap negara. Tingkat pengangguran harus ditekan hingga sampai pada tingkat pengangguran alamiah. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran diantaranya adalah dengan pengalokasian belanja pemerintah kepada sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau meningkatkan kinerja perekonomian melalui penyediaan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang lebih terbuka. Kuncoro (2004), memperlihatkan bahwa, terdapat tiga masalah pokok yang menjadi fokus perhatian penting pemerintah, antara lain; 1) Kemiskinan, 2) Pengangguran dan 3) Ketimpangan. Ketiga masalah ini tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling berkaitan satu sama lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada berbagai bidang lainnya. Dapat dikatakan bahwa, bila salah satu dari ketiga hal di atas mengalami "shock" maka, dua hal lainnya juga akan mengalami dampaknya. Arsyad (1999), mengatakan bahwa pembangunan daerah perlu memperhatikan untuk meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah

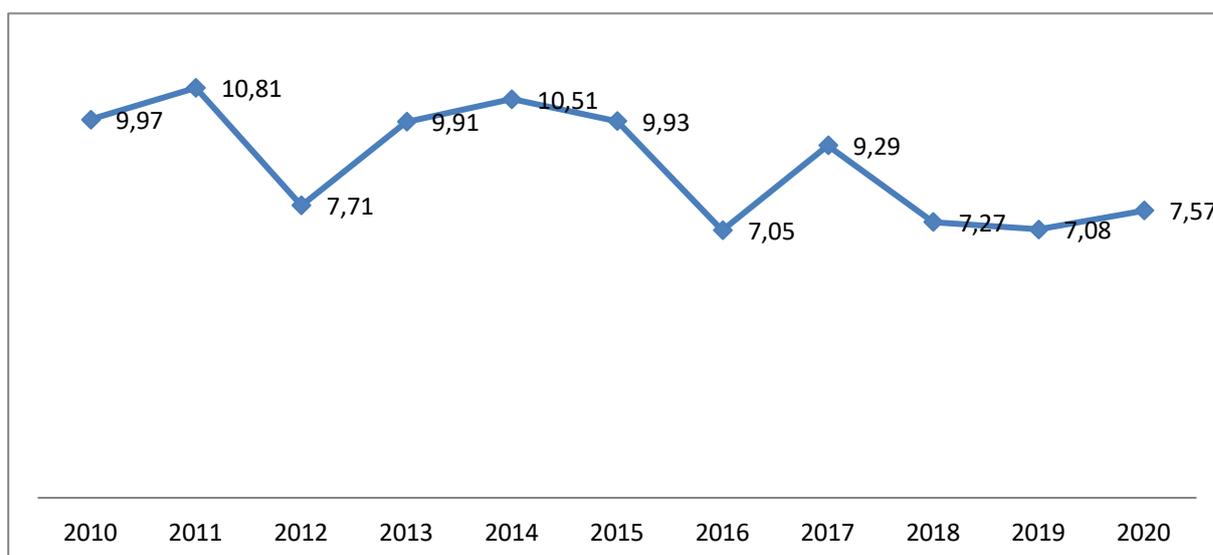
Pengangguran yang terjadi di Provinsi Maluku tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan selama 10 tahun terakhir. Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Maluku tercatat sebesar 1.541.903 jiwa; selanjutnya pada tahun 2020 jumlah penduduk Maluku bertambah menjadi 1.848.923 jiwa, atau rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,83 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021). Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun terlihat pada gambar 2 di bawah ini



**Gambar 2.** Jumlah Penduduk Provinsi Maluku (Jiwa) Tahun 2010 – 2020

**Sumber data:** Maluku Dalam Angka Berbagai Terbitan.

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk dari sensus penduduk tahun 2010 sampai dengan sensus penduduk tahun 2020 mengalami pertumbuhan setiap tahun. Pertumbuhan penduduk ini kemudian memberikan pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja. Jika tidak dibarengi dengan penciptaan kesempatan kerja, maka dapat menimbulkan pengangguran. Mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.



**Gambar 3.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2010 - 2020 (Persen)

**Sumber data:** Maluku Dalam Angka Berbagai Terbitan

Gambar 2 tersebut memperlihatkan bahwa selama periode 2010 sampai dengan tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka di provinsi Maluku mengalami trend yang fluktuatif. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, angka pengangguran di provinsi Maluku telah berada dibawah angka sepuluh persen. Sekalipun demikian, tingkat pengangguran terbuka ini masih tinggi, karena masih di atas tingkat pengangguran terbuka nasional yaitu sebesar 7,07% (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ini perlu mendapat perhatian semua pihak, sebab pengangguran dapat menyebabkan terjadinya masalah kerawanan seperti, tindak kriminal, gejala sosial, politik dan kemiskinan.

Beberapa studi yang mengkaji pengangguran baik tingkat regional ataupun nasional dapat disebutkan misalnya penelitian Wardiansyah et al., (2016) di Pulau Sumatera yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dian Priastiwi dan Handayani (2019), dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan dalam menambah pengangguran sedangkan tingkat pendidikan, upah dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan pengangguran. Penelitian yang melihat hubungan antara inflasi dengan pengangguran di Indonesia menunjukkan hubungan yang negatif selama periode 2005 sampai 2019 (Suharti et al., 2021) sedangkan hubungan yang positif dilakukan oleh (Diakhoumpa, 2020; Rafika, 2021). Ini berarti pendekatan kurve Phillips pada kasus ini yang menghubungkan antara inflasi dengan pengangguran kurang tepat.

Ada dua jenis pengangguran karena pandemic Covid-19 yaitu pengangguran karena kehilangan pekerjaan dan yang masih bekerja tetapi terkena dampak oleh pandemic Covid-19 (Teguh dan Yudistia, 2021). Kondisi ini menjadikan interaksi supply dan demand di pasar menjadi lemah. Pada gilirannya pendapatan masyarakat menurun dan daya beli berkurang. Dalam skala makro pertumbuhan ekonomi selama periode ini mengalami penurunan yang signifikan. Sejak pandemic covid-19 melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan termasuk Provinsi Maluku, maka kegiatan ekonomi banyak mengalami kontraksi. Sejumlah perusahaan harus menghentikan usahanya, karena adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan orang sehingga permintaan masyarakat berkurang. Akibatnya terjadi over produksi yang kemudian menambah beban perusahaan. Banyak perusahaan yang mengambil langkah untuk sementara waktu merumahkan sejumlah pekerjanya, bahkan melakukan PHK (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2022). Tentu saja hal ini memberikan efek domino terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli berkurang dan pada gilirannya dampaknya terhadap produksi barang dan jasa di sektor riil. Menurut Djirimu (2021),

bahwa ada empat aspek kehidupan yang terkena dampak pandemi Covid-19 yaitu kesehatan, sosial, ekonomi dan finansial.

Dana stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum secara optimal memberikan dampak positif, hal ini karena pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan sesuai peruntukannya. Tingkat penyerapan anggaran selama tahun 2020 sebesar 77,45%. Bahkan pada triwulan pertama hanya 9,20% sedangkan pendapatan transfer sebesar 98,48% (Badan Pusat Statistik Maluku, 2021). Tahun 2020 Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana dari APBN sebesar Rp. 937,42 triliun, dari APBD sebesar Rp. 86,36 triliun dan dari sektor moneter sebesar Rp. 6,50 triliun untuk menangani Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi (Muhyiddin and Nugroho, 2021). Disisi lain pemerintah melakukan realokasi dan *refocusing* terhadap berbagai program-program pembangunan guna mencegah semakin meningkatnya penularan virus Covid-19. Kebijakan ini belum mampu untuk mencegah terjadinya kontraksi perekonomian, khususnya mengatasi tingkat pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui profil pengangguran di provinsi Maluku.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sumber data adalah data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Keuntungan menggunakan data sekunder adalah penghematan waktu dan biaya dalam memperoleh informasi. Cakupan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada tahun 2019 dan 2020.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dari berbagai sumber yang sudah terpublikasi secara resmi berupa laporan BPS Provinsi Maluku Tahun 2019 dan 2020
2. Metode studi pustaka, yaitu metode yang dilakukan dengan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji literatur pustaka, seperti buku ilmiah, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. Browsing Internet, digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi-informasi tambahan yang menjadi objek penelitian seperti laporan BPS Provinsi Maluku, serta data-data tambahan dan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

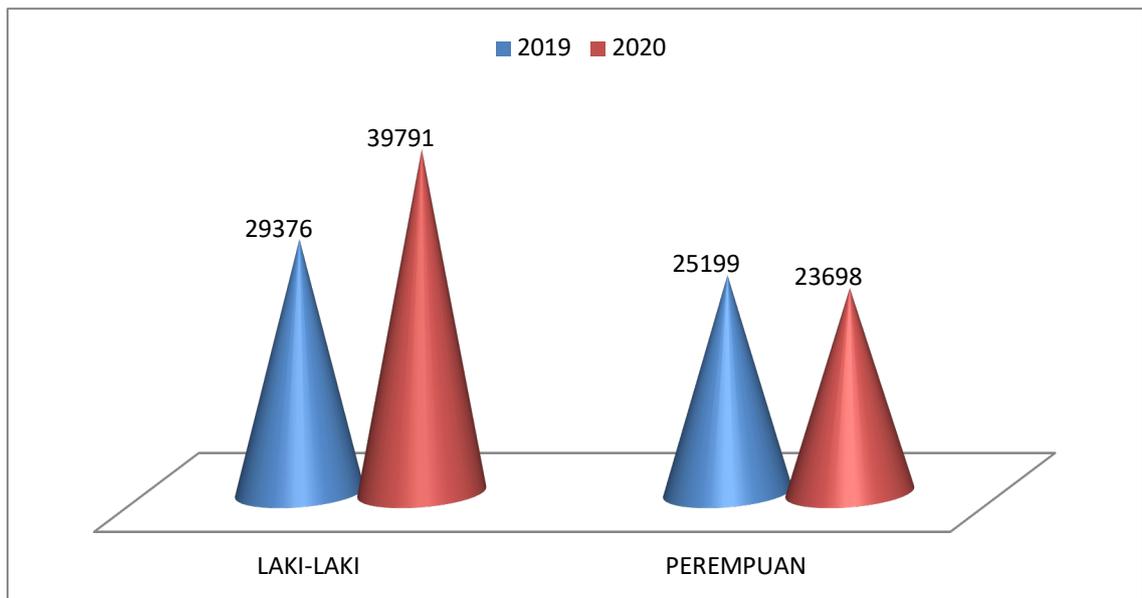
Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan fenomena pengangguran di Provinsi Maluku apa adanya yang dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Pengangguran berdasarkan jenis kelamin
- b. Pengangguran berdasarkan umur
- c. Pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan
- d. Pengangguran berdasarkan daerah Kabupaten/Kota

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengangguran Dibedakan Berdasarkan Jenis Kelamin***

Pengangguran di Provinsi Maluku selama Tahun 2020 di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pandemic Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap dunia usaha dan dunia industri, sehingga banyak perusahaan yang harus mengurangi kegiatan usahanya atau berhenti berproduksi untuk sementara waktu. Hal ini memberikan akibat terhadap adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu terjadi peningkatan pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2019, maka jumlah pengangguran secara keseluruhan untuk 2020 naik sebesar 16,33%. Angka ini cukup besar dan kenaikannya cukup signifikan. Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka angka pengangguran untuk dua periode waktu memperlihatkan bahwa laki-laki lebih besar dari perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.



**Gambar 4.** Jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 dan 2020  
**Sumber data:** Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021

Data pada gambar 4 di atas memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran untuk laki-laki mengalami pertumbuhan sebesar 35,45% sedangkan untuk perempuan turun sebesar 5,96%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pada masa pandemic covid-19 laki-laki lebih banyak yang menganggur. Hal ini bisa disebabkan oleh terjadinya PHK, sedangkan laki-laki sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau untuk menciptakan pekerjaan baru bagi dirinya. Sementara perempuan bisa melakukan pekerjaan sederhana tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Pilihan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tumpuan bagi ibu rumah tangga.

#### ***Pengangguran Berdasarkan Umur***

Pengangguran berdasarkan umur memperlihatkan bahwa lebih banyak terkonsentrasi pada usia muda atau produktif, walaupun pada tahun 2020 semasa pandemi Covid-19, terjadi pengurangan pada kelompok umur 15 – 19 tetapi bertambah pada umur 20 – 24 tahun. Ini terjadi karena sudah terjadi penambahan pengangguran pada umur 20 tahun sehingga dalam kelompok umur ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan walaupun dengan proporsi yang menurun. Demikian pula pada kelompok umur 25 – 29 terjadi pengurangan dari tahun 2019, tetapi terjadi peningkatan pada kelompok umur 30 – 34 tahun. Demikian juga untuk kelompok umur 40 tahun ke atas, terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang berarti. Hal ini dapat memberikan indikasi, bahwa selama tahun 2020 dapat diduga terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Hal lainnya adalah terjadi pergeseran jumlah pengangguran dalam kelompok usia muda (dari umur 15 – 29) ke kelompok usia 30 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Jumlah Pengangguran Berdasarkan Umur Tahun 2019 – 2020

Umur	2019	2020
15 – 19	10.701	8.289
20 – 24	21.924	14.619
25 – 29	11.793	10.134
30 – 34	3.579	7.775
35 – 39	2.019	6.285
40 – 44	907	6.827
45 – 49	1.783	3.410
50 – 54	1.138	1.730
55 – 59	262	2.656
60+	469	1.764

Jumlah	54.575	63.489
--------	--------	--------

Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021

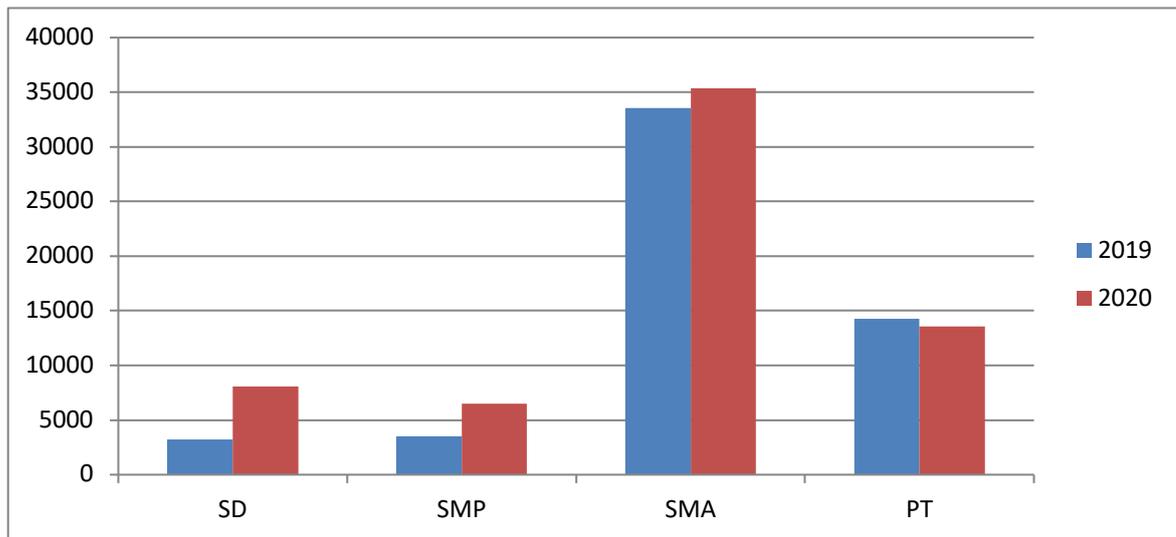
Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019, jumlah pengangguran terkonsentrasi pada kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu sebesar 40,17%, kemudian disusul kelompok 25 – 29 tahun sebesar 21,61% dan kelompok umur 15 – 19 sebesar 19,61% dan yang paling kecil adalah kelompok umur 55 – 59 sebesar 0,48%. Pada tahun 2020 struktur pengangguran tidak mengalami perubahan, Cuma terjadi perubahan proporsi. Untuk kelompok umur 20 – 24 terjadinya penurunan proporsi menjadi 23,03% atau turun sebesar 17,14 point dan menunjukkan angka yang relatif besar. Demikian juga pada kelompok 25 – 29 turun menjadi 15,96% atau sebesar 5,65 point dan kelompok umur 15 – 19 turun menjadi 8,87% atau sebesar 10,74 point. Akibatnya terjadi pembengkan pada kelompok umur lainnya. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 40 – 44 yang menjadi sebesar 6.827 atau naik sebanyak 5.920 jiwa atau sekitar 652,70%. Kemudian kelompok umur 35 – 39 naik menjadi 6.285 atau terjadi peningkatan sebesar 4.266 jiwa atau sebesar 211,29% dan kelompok umur 30 – 34 naik menjadi 7.775 jiwa atau bertambah sebesar 4.196 jiwa atau sebesar 117,24%.

Perubahan terbesar juga terjadi pada kelompok umur 55 – 59 tahun bertumbuh sebesar 913,74%. Ini memberikan arti bahwa pandemic covid-19 telah merubah struktur pengangguran di Provinsi Maluku berdasarkan kelompok umur. Terjadi pergeseran pertumbuhan (secara relatif) perubahan jumlah pengangguran dari usia produktif kepada usia yang lebih tua atau dengan kata lain sudah banyak yang memasuki usia pensiun jika itu anggota TNI/Polri, ASN, atau pegawai BUMN. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran yang ada di Provinsi Maluku selama dua periode waktu lebih banyak pada usia muda dan usia produktif, karena pada usia 30 tahun ke atas jumlah pengangguran sudah terlihat lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa pengangguran dalam kelompok ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya.

- Dari sisi sosial lebih mudah memicu terjadinya tindakan kriminal, pelanggaran hukum dan masalah sosial lainnya.
- Dari sisi ekonomi, kelompok ini adalah kelompok usia produktif yang memiliki produktifitas yang tinggi. Karena itu perlu untuk diberdayakan.
- Dapat dikatakan sebagai pengangguran terdidik sehingga jika pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk pelatihan, manajerial, teknik produksi, pemasaran dan akuntansi dapat difahami dengan mudah. Selain itu pemerintah dapat memberikan dana stimulan untuk membuka atau memulai usaha yang baru yang dapat menciptakan kesempatan kerja minimal untuk dirinya sendiri.

### ***Pengangguran Berdasarkan jenjang pendidikan***

Pengangguran berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan tingkat penyerapan jumlah lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dalam pasar kerja. Pada tahun 2019, pada umumnya pengangguran di Provinsi Maluku didominasi oleh penduduk yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) yang menempati urutan pertama dengan proporsi sebesar 61,51%, kemudian lulusan Perguruan Tinggi sebesar 26,18%, kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) sebesar 6,40% dan terakhir yang lulusan Sekolah Dasar atau tidak pernah sekolah sebesar 5,91%. Pada tahun 2020 struktur pengangguran mengalami sedikit perubahan di mana pengangguran dengan tidak pernah sekolah atau hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) melebihi dari pengangguran yang lulusan Sekolah Menengah Pertama, yaitu berubah menjadi 12,70% dan 10,26%. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas masih menjadi urutan pertama sebesar 57,23% sedangkan lulusan Perguruan Tinggi sebesar 21,38%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



**Gambar 5.** Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
**Sumber data:** Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021

Pada gambar 5 di atas memperlihatkan bahwa untuk semua jenjang pendidikan jumlah pengangguran pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 kecuali pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Ada dua hal yang menyebabkan perubahan ini yaitu:

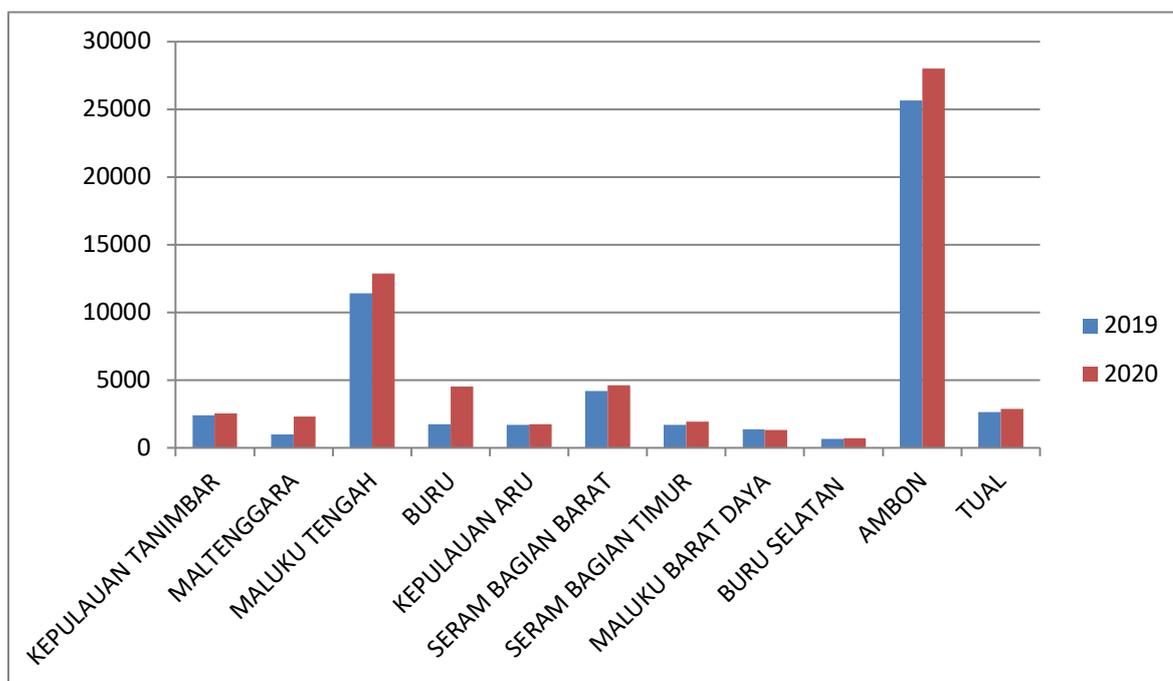
- a. Munculnya wirausaha baru yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19 sebagai peluang usaha dengan membuka unit-unit usaha baru.
- b. Diterima sebagai ASN pada formasi tahun 2020.

Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah pengangguran terbanyak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebesar 150,17%, kemudian jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama tumbuh sebesar 86,49% dan Sekolah Menengah Atas tumbuh sebesar 5,26%, sedangkan lulusan Perguruan Tinggi turun sebesar 4,99%.

#### ***Pengangguran Berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota***

Pada tahun 2019 distribusi jumlah pengangguran berdasarkan daerah kabupaten/kota didominasi oleh Kota Ambon yaitu sebesar 47,02%, kemudian Kabupaten Maluku Tengah sebesar 20,95%, disusul Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 7,68% dan yang paling kecil adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 1,22%. Penyebaran ini tidak berubah pada tahun 2020 tetap didominasi oleh Kota Ambon sebesar 44,15%, menurun sebesar 2,87 point. Kabupaten Maluku Tengah sebesar 20,31% menurun sebesar 0,64 point dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 7,29% atau turun sebesar 0,39 point, sedangkan Kabupaten Buru Selatan menjadi 1,1% atau turun 0,12 point. Secara keseluruhan hanya ada satu daerah yang jumlah penganggurannya menurun pada tahun 2020 yaitu Kabupaten Maluku barat Daya sebesar 3,38%. Di daerah ini terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja sebesar 0,66%.

Secara umum jumlah orang yang bekerja bertambah sebesar 8,37% sedangkan jumlah pengangguran bertambah sebesar 16,33%. Terlihat bahwa pertumbuhan pengangguran lebih besar dibandingkan pertumbuhan orang yang bekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga jumlah angkatan kerja juga bertambah. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar 1,83% dan pertumbuhan angkatan kerja adalah sebesar 8,93% masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju jumlah orang yang bekerja. Penyebaran jumlah pengangguran di Provinsi Maluku berdasarkan Kabupaten/Kota terlihat pada gambar 6 di bawah ini.



**Gambar 5.** Jumlah Pengangguran Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
**Sumber data:** Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021

## KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Maluku didominasi oleh penduduk usia muda dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian, berdasarkan jenjang pendidikan, maka Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mendominasi jumlah pengangguran. Penyebaran pengangguran berdasarkan kabupaten/kota terbanyak adalah di Kota Ambon dan terkecil adalah Kabupaten Buru Selatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi Daerah: Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*. BPFE - UGM.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019*. In *Badan Pusat Statistik: Vols. XXIII, 05 (Issue 91)*.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (2021). *Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2021). *Provinsi Maluku Dalam Angka 2021*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Maluku Februari 2022 (Issue 27/05/81/Th. XXII)*.
- Blanchard Olivier and David R Johnson. (2013). *Makroekonomi (Edisi keenam)*. Erlangga.
- Diakhoumpa, M. (2020). *Effects of Economic Growth and Inflation on Unemployment: An Empirical Analysis in Senegal from 1991 to 2018*. *Journal of Economics Library*, 3(1), 100–110.
- Djirimu, M. . (2021). *Daya Saing Kawasan Indonesia Timur Dalam Masa Pandemic Covid-19 (Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Akademisi Nusantara)*.
- Kaufman B.E and Hotchkiss, J. . (1999). *The Economic of Labor Markets. (Fifth Edit)*. The Dryden Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*. YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. (2013). *Teori Makro Ekonomi. (Terjemahan)*. Erlangga.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). *A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia's Development*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>

- Priastiwi, Dian dan Handayani H R. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, Dan Pdrb Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 159–169. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Rafika, I. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2010. *Open Journal Systems*, 16(1), 5961–5968. <https://ejournal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1074/pdf>
- Sadono, S. (2001). *Pengantar Ekonomi Makro*. Rajawali.
- Sugianto dan Permadhy, Y. T. (2020). Faktor penyebab pengangguran dan strategi penanganan permasalahan pengangguran pada desa bojongcae, cibadak lebak provinsi banten. *Ikra-Ith Ekonomika*, 2(3), 54–63. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/583>
- Suharti, S., Naufal, M. D., & Paiman, F. L. (2021). Inflation Effect on Unemployment in Indonesia: A Comparative Studies Between Sharia and Conventional Economic Perspectives. *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(2), 127–138. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.2.127-138>
- Teguh A. F. dan Yudistia. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59>
- Wardiansyah, M. Y. Z. B. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera. *E-Jurnal Ilmu Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5(1), 13–18.